

## 20.44: Demokrasi Melesat Cepat!

### Teuku Kemal Fasya

Ruangan itu semakin dingin karena suhu malam yang mulai merayap. Kelelahan pun sudah memenuhi pikiran, tubuh, dan jiwa. Api kemarahan akibat demo brutal siang telah meredup. Ketika 4.390 halaman putusan hukum dibacakan selama enam jam lebih hampir menemukan hilir, suara ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, semakin mantap membacakan putusan: menolak seluruh permohonan tim Prabowo – Hatta terkait kecurangan pemilihan presiden. Waktu berdentang tepat pada pukul 20.44 WIB!

Selaksa ada kepuasan yang besar di dada sebagian besar rakyat Indonesia. Kegembiraan seperti lepas dari ruangan yang pengap minim udara. Ada kelegaan yang tak terkira bahwa seluruh proses perselisihan hasil pemilihan presiden ini akhirnya usai. Keputusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Tak ada yang membantah tentang itu. Eksistensi MK sebagai supremasi hukum tertinggi adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, seperti galib berlaku di *Constitutional Court* mana pun di dunia.

20.44 WIB 21 Agustus 2014 menjadi tonggak baru demokrasi Indonesia. Sebenarnya momentum ini sudah jauh hari menemukan nilai *de facto*-nya ketika hasil pilpres telah diketahui 9 Juli 2014 malam melalui *quick count* lembaga-lembaga survei kredibel. Namun Tim Prabowo – Hatta masih belum yakin dengan hasil *quick count* kecuali yang didukung oleh mereka sendiri.

Melalui siaran televisi milik para kompatriotnya, TV One dan MNC Groups, hasil survei memenangkan pasangan Prabowo-Hatta disiarkan. Sorak-sorai diperlihatkan di televisi bahwa barisan pendukung Prabowo – Hatta bergembira. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Keempat lembaga survei itu ternyata salah dalam menentukan hasil ketika pada 22 Juli 2014 KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional. Prabowo – Hatta mendapatkan suara 46,85 persen (62.576.444 suara) dan Jokowi – JK mendapatkan (53,15 persen atau 70.977.833 suara).

Drama ternyata belum berhenti. Prabowo marah tak terkendali ketika keputusan KPU belum lagi selesai dibacakan saat rekapitulasi final *real count*. Ia nyatakan mundur dari proses pilpres. Namun mundurnya Prabowo saat itu tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Bahkan dalam beberapa tafsiran pasal 246 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pilpres perilaku tersebut bernuansa pidana. Ekspresi kemarahan cum putus-asa itu menyeruak ke ruang publik dan ditangkap oleh pendukung-pendukung Prabowo sebagai sinyal kebenaran. Mereka *haq al yakin* Prabowo korban konspirasi pemilu yang tidak adil, jujur, dan demokratis. Sayang kemarahan itu tak panggah. Ia malah menarik

kata-katanya. Tim Prabowo malah menggugat hasil pilpres ke MK, menandakan pengakuan pada proses pemilu yang dilaksanakan KPU itu.

Kali ini lagi-lagi Prabowo marah-marah, kesal, dan sedih saat sidang pertama MK. Pernyataan bahwa demokrasi Indonesia lebih buruk dari Korea Utara bukan saja merendahkan proses reformasi yang telah dirintis oleh anak bangsa ini, dimulai dengan kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998 hingga dua periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), tapi juga menisbikan semua capaian yang sudah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu membawa Indonesia sebagai *Champion of Democracy*. Prabowo tak sadar telah menghina sesama *kamerad* Koalisi Merah-Putih: Partai Demokrat. Padahal kita tahu seperti apa upaya Prabowo agar Demokrat mengubah pendiriannya dari netral menjadi berpihak kepadanya dalam pilpres.

Apakah histeria dan halusinasi Prabowo di MK itu menarik simpati publik? Ternyata tidak. Hasil survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjawab semua indikator antipati publik kepada sikap Koalisi Merah Putih. Hasil survei yang dilakukan pada 21-26 Juli 2014 atau ketika Prabowo ingin melanjutkan persengketaan ini ke MK, sebagian besar rakyat Indonesia (57,3 persen) yakin bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik. Melakukan pemilu adalah ekspresi demokrasi utama yang harus dilakukan untuk menyegarkan sel-sel kekuasaan. Ini sekaligus menjadi sinyal bahwa sikap Prabowo dkk bersengketa di MK hanya mencari gara-gara yang tak akan memberikan hasil.

20.44 WIB 21 Agustus 2014 malam menjadi titik kemenangan demokrasi baru. Pembacaan lantang tentang semua tuduhan pelanggaran seperti pembukaan kotak suara, pemilih fiktif, tiadanya pemilihan, rekayasa kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) hingga menggugat kearifan demokrasi Papua melalui sistem Noken tidak diterima sebagai dalil yang dapat dibenarkan oleh majelis hakim.

Majelis hakim bisa membedakan dengan pikiran jernih, mewakili kebenaran Tuhan yang dititipkan kepada mereka melalui sakralitas lembaga keadilan tertinggi itu, mana yang bisa disebut sebagai fakta dan mana yang layak masuk keranjang fiksi. Para hakim memberikan jawaban tidak. Bahkan tidak ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari para hakim. Padahal awalnya muncul kecurigaan akan ada hakim yang tidak satu suara, sebab sebagian hakim adalah eks kader partai yang kebetulan berada di barisan Prabowo – Hatta.

Namun mereka memilih menjaga integritas dibandingkan terseret sikap infantilisme atas nama korp kepartaian. Sikap ini menunjukkan bahwa para majelis hakim ingin memberikan citra pengadilan MK sebagai waduk keadilan terakhir di negeri ini, meskipun sempat tercoret arang oleh

perilaku Akil Mochtar. Sebab, ketidakadilan dan sikap mengicuh, meskipun bisa meyakinkan saat ini dan sebagian orang, tidak bisa menipu seluruh sejarah dan semua orang. Seperti ucapan Mahatma Gandhi yang bergema di ujung gendang telinga, *“Aku tak perlu takut dengan siapa pun di atas bumi ini. Aku hanya takut kepada Tuhan. Aku tidak akan berniat buruk kepada siapa pun. Aku tak akan tunduk kepada ketidakadilan yang ingin dipaksakan oleh siapa pun. Aku akan menaklukkan ketidakadilan dengan keadilan. Dan untuk melawan ketidakadilan itu aku bersedia menanggung penderitaan.”*

Melawan rasa takut dan ketidakadilan dengan menanggung penderitaan ini mungkin masuk ke dalam kesadaran para hakim itu. Ya penderitaan oleh desakan massa, uang, dan juga ancaman penculikan hanya debu penderitaan dibandingkan penderitaan yang lebih besar: kehilangan harga diri dan kemulian karena menjadi kroco ketidakadilan.

Setelah 20.44 WIB malam itu demokrasi bergerak cepat. Semoga ia bisa melesat meninggalkan para kucing yang mengeong di ruang gelap reformasi. Sejak menit ke-45 malam itu perubahan dibentangkan dan kemenangan rakyat semakin dekat.

[www.siperubahan.com](http://www.siperubahan.com), 22 Agustus 2014.